

Lembar Kerja Peserta Didik

**Mapel PPKn**

**BAB 3**

Perumusan dan Pengesahan UUD NRI 1945

Disusun untuk memenuhi tugas PPG Daljab

Angkatan Kedua Unwidha 2020



MAHKAMAH KONSTITUSI

Disusun Oleh : Azis Saefudin, SAP, SPd

KELAS  
VII



Nama : Azis Saefudin, S.AP., S.Pd.  
No. Peserta : 2003 0215 4101 81  
Prodi PPG : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)  
Dosen : Drs. Abdul Ghofir, M.Pd.

## Lembar Kerja Peserta Didik

<b>Sekolah</b>	:	SMP Negeri 3 Karanglewas
<b>Mata Pelajaran</b>	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
<b>Kelas/Semester</b>	:	VII (tujuh)/ I (satu)
<b>Kompetensi Dasar (KD)</b>	:	1.3. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia 2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara 3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3 Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<b>Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)</b>	:	3.3.1 Mendeskripsikan perumusan UUD Negara Republik Indonesia dalam Sidang Kedua BPUPKI. 3.3.2 Mendeskripsikan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.3.1 Memiliki tanggungjawab untuk memahami UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara utuh.
<b>Materi Pokok</b>	:	Perumusan dan Pengesahan UUD NRI 1945
<b>Sub Materi</b>	:	Perumusan dan Pengesahan UUD NRI 1945 pada sidang BPUPKI Kedua

### A. Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan macam –macam dan fungsi Konstitusi dengan benar dan bertanggung jawab
2. Menganalisis pembentukan, keanggotaan, tugas dan hasil pembahasan Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar dengan benar
3. Dengan membaca buku paket dan referensi dari internet, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perumusan UUD Negara Republik Indonesia dalam Sidang Kedua BPUPKI.
4. Dengan membaca buku paket dan referensi dari internet, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dengan membaca buku paket dan mengamati tayangan video, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan nilai kesejarahan perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Nama : Azis Saefudin, S.AP., S.Pd.  
No. Peserta : 2003 0215 4101 81  
Prodi PPG : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)  
Dosen : Drs. Abdul Ghofir, M.Pd.

## B. Petunjuk Belajar

1. Cermati materi dalam buku paket, handout (rangkuman materi) atau pada sumber informasi pendukung lainnya (situs internet).
2. Kerjakan soal secara berkelompok
3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain



## C. Materi Pelajaran



### Bacalah materi berikut dengan cermat!

Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu

Menurut ECS WADE bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di tetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.



Nama : **Azis Saefudin, S.AP., S.Pd.**  
No. Peserta : **2003 0215 4101 81**  
Prodi PPG : **Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)**  
Dosen : **Drs. Abdul Ghofir, M.Pd.**

Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda "Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan". Panitia Perancangan Undang-undang Dasar melaporkan hasilnya.

Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara "Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar". Ir. Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai Panitia Kecil Perancang Undang- Undang Dasar, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di hasilkan keputusan sebagai berikut.

- a. Mengesahkan UUD 1945.
- b. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
- c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

Empat perubahan pada perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua adalah sebagai berikut :

- a. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
- b. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa"
- c. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli."
- d. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"





Nama : Azis Saefudin, S.AP., S.Pd.  
No. Peserta : 2003 0215 4101 81  
Prodi PPG : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)  
Dosen : Drs. Abdul Ghofir, M.Pd.

### D. Soal Latihan

**Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!**

1. Jelaskan Tiga panitia kecil yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI !
2. Siapa tokoh yang berperan dalam panitia perancang UUD NRI 1945
3. Analisislah Hubungan antara Panitia Kecil Perancang UUD dengan Panitia Perancang UUD NRI 1945
4. Jelaskan jadwal dan isi materi pembahasan sidang kedua BPUPKI
5. Jelaskan Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
6. Analisislah Hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD NRI 1945,

